

Smart Citizen sejak Dini: Model Literasi Pajak Berbasis Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar

Smart Citizen from an Early Age: A Tax Literacy Model Based on Character Education in Elementary Schools

Ismail¹, Rahmat¹

Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia

ABSTRAK

Literasi pajak pada jenjang sekolah dasar belum banyak dikembangkan karena pajak umumnya dipandang sebagai konsep ekonomi yang berkaitan dengan orang dewasa. Padahal, pemahaman awal mengenai hubungan antara kontribusi warga, fasilitas publik, dan tanggung jawab sosial penting untuk membangun kesadaran kewargaan sejak dini. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model Smart Citizen sejak Dini berbasis literasi pajak dan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan mengadaptasi tahapan Borg dan Gall yang meliputi analisis kebutuhan, pengembangan model, validasi ahli, revisi, dan uji coba terbatas. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 176 Belajen, Kabupaten Enrekang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, validasi ahli, dan tes pemahaman, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Smart Citizen sejak Dini melalui sintaks CERDAS (Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, dan Sadari) memperoleh kategori sangat layak dengan skor validasi rata-rata 4,50. Implementasi model menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran sebesar 91,25% serta peningkatan pemahaman literasi pajak siswa dari 65% menjadi 84%. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi pajak, pendidikan karakter, dan pembelajaran kewargaan melalui pendekatan kontekstual dapat menjadi strategi inovatif dalam membentuk siswa yang memiliki kesadaran publik, tanggung jawab sosial, dan karakter sebagai warga negara sejak sekolah dasar.

Kata Kunci: Literasi pajak; pendidikan karakter; smart citizen; pendidikan kewargaan; CERDAS

ABSTRACT

Tax literacy at the elementary school level has received limited attention because taxation is generally perceived as an economic concept related to adults. However, early understanding of the relationship between citizens' contributions, public facilities, and social responsibility is essential for developing civic awareness from an early age. This study aimed to develop the Smart Citizen sejak Dini model based on tax literacy and character education for elementary school students. This research employed a Research and Development (R&D) approach by adapting Borg and Gall's development procedures, consisting of needs analysis, model development, expert validation, revision, and limited trial implementation. The research participants were fifth-grade students at SDN 176 Belajen, Enrekang Regency. Data were collected through observations, interviews, questionnaires, expert validation, and literacy comprehension tests, and were analyzed using descriptive quantitative and qualitative techniques. The results showed that the Smart Citizen sejak Dini model through the CERDAS framework (*Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, and Sadari*) was categorized as highly feasible, with an average validation score of 4.50. The implementation of the model achieved a learning feasibility rate of 91.25% and improved students' tax literacy understanding from 65% to 84%. These findings indicate that integrating tax literacy, character education, and civic learning through a contextual approach can serve as an innovative strategy to foster students' public awareness, social responsibility, and civic character from an early age.

Keywords: Tax literacy; character education; smart citizen; civic educational CERDAS

ARTICLE HISTORY

Received: 11 April 2025

Revised: 27 May 2025

Accepted: 20 June 2025

Published: 15 July 2025

CORRESPONDING AUTHOR:

Ismail

Email:

smileummaspul@gmail.com

CITATION:

Ismail, I., & Rahmat, R. (2025). Smart Citizen from an Early Age: A Tax Literacy Model Based on Character Education in Elementary Schools. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.33487/mgr.v6i1.344>

COPYRIGHT:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License \(CC BY-SA\)](#).



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk membiayai penyediaan barang dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta berbagai pelayanan pemerintahan. Dalam perspektif kewarganegaraan, pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif atau aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Warga memberikan kontribusi kepada negara, sedangkan negara berkewajiban mengelola penerimaan tersebut secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak berkaitan erat dengan kesadaran terhadap hak, kewajiban, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kajian mengenai *tax morale* menunjukkan bahwa kemauan warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak semata-mata dibentuk oleh ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, kepercayaan kepada institusi, persepsi keadilan, dan keyakinan bahwa warga lain turut memberikan kontribusi secara proporsional (Frey & Torgler, 2007; Lago-Peñas & Lago-Peñas, 2010; Luttmer & Singhal, 2014).

Pembentukan warga negara yang memahami dimensi fiskal kehidupan bersama perlu dipandang sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan sejak usia sekolah. Konsep “Smart Citizen sejak Dini” dalam penelitian ini merujuk pada upaya membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak, mampu memahami keterkaitan pajak dengan kepentingan publik, memiliki pertimbangan moral mengenai kejujuran dan keadilan, serta menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk mengajarkan prosedur teknis perpajakan orang dewasa kepada siswa sekolah dasar. Pembelajaran lebih diarahkan pada pengenalan makna kontribusi bersama, fungsi pajak, manfaat fasilitas publik, prinsip keadilan, serta tanggung jawab warga dalam menjaga kepentingan umum. Orientasi ini sejalan dengan gagasan *financial citizenship education*, yang menempatkan pendidikan ekonomi tidak hanya sebagai pembelajaran pengelolaan uang pribadi, tetapi juga sebagai sarana mengembangkan kemampuan kritis dalam memahami sistem ekonomi, kebijakan publik, dan relasi antara individu, masyarakat, serta negara (Björklund, 2025).

Literasi pajak merupakan konsep multidimensional yang tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menghafal definisi, jenis, tarif, atau ketentuan perpajakan. Bornman dan Ramutumbu (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak mencakup pengetahuan umum, pengetahuan prosedural, pemahaman hukum, serta kemampuan menggunakan informasi perpajakan dalam pengambilan keputusan. Bornman dan Wassermann (2023) selanjutnya menempatkan literasi pajak sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, kesadaran, serta kemampuan memahami dan menggunakan informasi perpajakan dalam konteks kehidupan. Ketika diterapkan pada siswa sekolah dasar, konsep tersebut perlu disederhanakan tanpa kehilangan substansi dasarnya. Literasi pajak pada jenjang ini dapat mencakup kemampuan menjelaskan pengertian pajak dengan bahasa sendiri, mengidentifikasi contoh fasilitas yang pembiayaannya berkaitan dengan penerimaan negara atau daerah, memahami hubungan antara kontribusi warga dan layanan publik, membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, serta mengemukakan pendapat mengenai keadilan dan tanggung jawab sosial.

Hubungan antara pendidikan dan perilaku perpajakan juga perlu dipahami secara proporsional. Pendidikan tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan pajak pada masa dewasa. Rodríguez-Justicia dan Theilen (2018) menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan moral pajak dipengaruhi oleh konteks sosial, institusional, dan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan. Alexander dan Balavac-Orlić (2022) menegaskan bahwa cara suatu kewajiban dibingkai dan tingkat keadilan yang dirasakan dapat memengaruhi moral pajak seseorang. Penelitian terbaru terhadap mahasiswa di Vietnam juga memperlihatkan bahwa pendidikan pajak lebih berpotensi memengaruhi kepatuhan melalui peningkatan kesadaran pajak daripada melalui pengaruh langsung yang sederhana (Mac, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pajak sebaiknya tidak direduksi menjadi penyampaian pesan normatif agar peserta didik “patuh”, melainkan perlu membangun pengetahuan, kesadaran, penalaran moral, dan pemahaman mengenai alasan sosial di balik keberadaan pajak.

Sejumlah penelitian literasi pajak masih berfokus pada wajib pajak dewasa, pelaku usaha, mahasiswa, atau calon wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, Herawati et al. (2022) menemukan adanya peran literasi pajak dalam membentuk kesadaran pajak mahasiswa bidang ekonomi. Kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai dapat mendukung tumbuhnya kesadaran mengenai kewajiban fiskal. Meskipun demikian, pemberian pendidikan pajak ketika seseorang telah berada di perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai intervensi pada tahap relatif lanjut. Penanaman pemahaman dasar sejak sekolah memungkinkan peserta didik membangun kerangka berpikir mengenai kontribusi warga, layanan publik, dan tanggung jawab sosial sebelum mereka berhadapan dengan prosedur perpajakan secara langsung. Pendidikan sejak dini tidak diarahkan untuk menghasilkan kepatuhan administratif secara instan, tetapi untuk membangun fondasi pengetahuan dan disposisi kewargaan yang dapat dikembangkan secara bertahap.

Urgensi pengenalan literasi pajak sejak sekolah dasar juga dapat ditinjau dari perkembangan penelitian pendidikan literasi keuangan. Rendahnya pemahaman ekonomi dan keuangan pada kelompok usia muda menunjukkan bahwa kemampuan tersebut tidak selalu berkembang secara alamiah tanpa proses pendidikan yang terencana (Lusardi et al., 2010). Penelitian eksperimental pada siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa program pendidikan keuangan yang sesuai dengan usia dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan sebagian perilaku keuangan peserta didik (Batty et al., 2015). Collins dan Odders-White (2015) menekankan bahwa program untuk siswa sekolah dasar memerlukan tujuan pembelajaran yang jelas, materi yang dekat dengan pengalaman anak, aktivitas yang terstruktur, serta evaluasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kajian Amagir et al. (2018) juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan literasi keuangan bagi anak dan remaja dipengaruhi oleh relevansi materi, metode penyampaian, keterlibatan peserta didik, serta kesinambungan program.

Temuan mengenai efektivitas pendidikan keuangan tetap perlu digunakan secara kritis. Evaluasi berskala luas menunjukkan bahwa pembelajaran yang terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku keuangan peserta didik, tetapi besarnya dampak dapat berbeda berdasarkan desain, durasi, kualitas guru, serta kedekatan materi dengan keputusan nyata yang dihadapi siswa (Bruhn et al., 2016; Kaiser & Menkhoff, 2017). Meta-

analisis yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan keuangan secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan dan perilaku lanjutan, terutama ketika program dirancang secara tepat dan relevan dengan konteks peserta didik (Kaiser et al., 2022). Sebaliknya, efek program dapat melemah apabila pembelajaran hanya berupa penyampaian informasi yang terpisah dari kebutuhan dan pengalaman nyata (Fernandes et al., 2014; Hastings et al., 2013). Implikasi temuan tersebut bagi literasi pajak adalah perlunya pembelajaran kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan, bukan sekadar ceramah mengenai definisi dan kewajiban membayar pajak.

Literasi pajak pada jenjang sekolah dasar memiliki dimensi etis yang kuat karena di dalamnya terdapat persoalan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, solidaritas, dan penggunaan sumber daya bersama. Dengan demikian, pendidikan pajak memiliki titik temu yang relevan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui penyampaian nasihat atau pengenalan daftar nilai, tetapi perlu memadukan pemahaman moral, pertimbangan rasional, pengalaman emosional, keteladanan, pembiasaan, dan tindakan nyata dalam lingkungan sosial. Althof dan Berkowitz (2006) menjelaskan bahwa pendidikan moral dan pendidikan karakter memiliki hubungan erat dengan pendidikan kewarganegaraan karena ketiganya berorientasi pada pembentukan individu yang mampu bertindak secara bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Berkowitz dan Bier (2004) juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kurikulum, praktik pembelajaran, keteladanan orang dewasa, relasi sosial, serta budaya sekolah.

Integrasi literasi pajak dan pendidikan karakter perlu dilakukan secara reflektif agar pembelajaran tidak berubah menjadi indoktrinasi atau tuntutan kepatuhan tanpa penalaran. Siswa perlu memperoleh ruang untuk menanyakan alasan pajak diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat dari layanan publik, bagaimana kontribusi bersama seharusnya dikelola, dan mengapa keadilan serta transparansi penting dalam kehidupan bersama. Pendidikan karakter yang baik tidak hanya menuntut peserta didik mengulangi pernyataan bahwa kejujuran merupakan nilai yang baik, tetapi juga membantu mereka memahami alasan moral di balik tindakan jujur dan mempertimbangkan konsekuensi suatu pilihan bagi orang lain. Keteladanan guru penting dalam proses tersebut, tetapi keteladanan perlu disertai dialog dan refleksi agar peserta didik tidak sekadar meniru perilaku tanpa memahami maknanya (Sanderse, 2013). Selain itu, pendidikan karakter harus menghindari penyederhanaan karakter sebagai kumpulan sifat yang statis karena kebajikan terbentuk melalui latihan, penalaran, pengalaman, dan konteks sosial yang berkelanjutan (Kristjánsson, 2013).

Pada siswa kelas V sekolah dasar, literasi pajak dapat diperkenalkan melalui situasi konkret yang dekat dengan kehidupan mereka. Pembelajaran dapat dimulai dengan mengidentifikasi fasilitas yang digunakan bersama, seperti sekolah, jalan, pusat kesehatan, taman, sarana kebersihan, perpustakaan, atau layanan pemerintahan. Peserta didik kemudian dapat diajak mendiskusikan dari mana sumber daya untuk membangun dan merawat fasilitas tersebut diperoleh. Kegiatan dapat dilanjutkan melalui cerita kontekstual, permainan peran, simulasi pengumpulan kontribusi, penyusunan anggaran sederhana, analisis kasus keadilan, pemetaan fasilitas publik, diskusi kelompok, proyek kelas, dan refleksi tertulis. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mengetahui bahwa pajak berkaitan dengan pembiayaan publik,

tetapi juga berlatih membuat keputusan, menyampaikan alasan, mendengarkan pandangan orang lain, serta mempertimbangkan kepentingan bersama.

Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dapat memperkuat keterhubungan antara pengetahuan, nilai, dan tindakan. Meta-analisis mengenai *service-learning* menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dapat mendukung perkembangan akademik, sosial, dan kewargaan (Celio et al., 2011). Program pembelajaran sosial-emosional di sekolah juga memperlihatkan bahwa kompetensi seperti kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan kemampuan membangun relasi dapat dikembangkan melalui intervensi yang terstruktur (Durlak et al., 2011). Pada saat yang sama, evaluasi pendidikan karakter perlu memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik dan tidak hanya mengukur kemampuan mengulang nilai-nilai yang diajarkan (Schultz et al., 2001). Oleh sebab itu, model literasi pajak berbasis pendidikan karakter perlu menyediakan aktivitas yang memungkinkan siswa memahami konsep, mengalami dilema sederhana, mendiskusikan pilihan, dan merefleksikan akibat dari suatu keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, kelas V SDN 176 Belajen, Enrekang, ditempatkan sebagai ruang empiris untuk mengembangkan dan mengkaji penerapan model literasi pajak yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Penggunaan konteks lokal tidak berarti mengasumsikan adanya masalah atau tingkat literasi tertentu sebelum data penelitian diperoleh. Konteks sekolah dan lingkungan sekitar digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak melalui contoh yang familier. Nilai gotong royong, tanggung jawab, kepedulian terhadap fasilitas bersama, dan kejujuran dapat dihubungkan dengan pembahasan mengenai kontribusi warga dan kepentingan publik. Meskipun demikian, guru tetap perlu menjelaskan bahwa pajak berbeda dari sumbangan sukarela atau kegiatan gotong royong. Pajak memiliki dasar hukum dan dikelola melalui sistem pemerintahan, sedangkan gotong royong digunakan sebagai jembatan pedagogis untuk memahami prinsip kontribusi dan tanggung jawab bersama.

Model pembelajaran yang dikembangkan juga perlu memberikan pemahaman yang seimbang mengenai relasi warga negara dan negara. Literasi pajak tidak hanya memuat kewajiban warga untuk berkontribusi, tetapi juga hak warga untuk memperoleh pelayanan, informasi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya yang adil. Penekanan yang hanya berorientasi pada kepatuhan berisiko menjadikan siswa sebagai penerima informasi pasif. Sebaliknya, pendidikan kewargaan fiskal perlu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan, menilai alasan, memahami perbedaan kepentingan, dan menyampaikan pendapat secara santun. Dalam kerangka tersebut, warga negara yang cerdas bukan warga yang menerima setiap kebijakan tanpa pertimbangan, tetapi warga yang mampu memahami pentingnya kontribusi publik sekaligus memiliki kepedulian terhadap keadilan, transparansi, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab (Björklund, 2025).

Penilaian literasi pajak berbasis pendidikan karakter juga tidak dapat dibatasi pada tes pengetahuan faktual. Penilaian perlu mencakup sekurang-kurangnya tiga ranah. Pertama, ranah kognitif, berupa kemampuan menjelaskan pengertian dan fungsi pajak, mengidentifikasi manfaat publik, serta memahami alur sederhana kontribusi warga dan pelayanan negara.

Kedua, ranah evaluatif dan moral, berupa kemampuan memberikan alasan mengenai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Ketiga, ranah partisipatif, berupa kemampuan berdiskusi, bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan membuat keputusan dalam simulasi kewargaan. Penilaian dapat menggunakan soal terbuka, studi kasus sederhana, lembar refleksi, observasi aktivitas kelompok, penilaian proyek, serta wawancara yang disesuaikan dengan bahasa dan tingkat perkembangan siswa. Pendekatan multidimensional tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa literasi pajak melibatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan kemampuan menggunakan informasi secara kontekstual (Bornman & Ramutumbu, 2019; Bornman & Wassermann, 2023).

Kajian terdahulu menunjukkan adanya tiga kecenderungan yang masih berjalan secara terpisah. Pertama, penelitian perpajakan lebih banyak membahas pengetahuan, kesadaran, moral, dan kepatuhan wajib pajak dewasa atau mahasiswa. Kedua, pendidikan ekonomi pada jenjang sekolah lebih banyak berorientasi pada literasi keuangan personal, seperti menabung, menyusun anggaran, dan mengambil keputusan konsumsi, sementara dimensi pendapatan publik dan kewarganegaraan fiskal belum memperoleh perhatian yang sebanding. Ketiga, pendidikan karakter di sekolah dasar umumnya membahas nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong secara umum, tetapi belum selalu dihubungkan dengan persoalan konkret mengenai kontribusi warga, pembiayaan pelayanan publik, dan keadilan fiskal. Fragmentasi tersebut menunjukkan perlunya model yang mengintegrasikan literasi pajak, pendidikan karakter, dan pembelajaran kewarganegaraan dalam satu kerangka yang sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model literasi pajak yang mengintegrasikan tiga komponen utama. Komponen pertama ialah pemahaman konseptual, yang meliputi pengertian sederhana mengenai pajak, fungsi pajak, hubungan pajak dengan barang dan layanan publik, serta perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Komponen kedua ialah internalisasi nilai karakter, terutama kejujuran, tanggung jawab, keadilan, gotong royong, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Komponen ketiga ialah kecakapan kewargaan partisipatif dan kritis, yang mencakup kemampuan berdiskusi, memberikan alasan, mempertimbangkan dampak suatu keputusan, memahami hak dan kewajiban, serta menilai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ketiga komponen tersebut diterjemahkan ke dalam aktivitas kontekstual yang dekat dengan pengalaman siswa kelas V dan dinilai melalui instrumen yang mencakup aspek kognitif, karakter, dan partisipasi.

Model ini juga memiliki relevansi bagi praktik pendidikan guru sekolah dasar. Guru memerlukan kemampuan untuk menyederhanakan konsep fiskal tanpa menghasilkan pemahaman yang keliru, memilih contoh yang netral, memfasilitasi diskusi mengenai keadilan, serta menghubungkan materi dengan pendidikan karakter dan kehidupan sehari-hari. Bagi program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kajian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kompetensi calon guru untuk mengintegrasikan pendidikan ekonomi, kewarganegaraan, dan karakter. Pembelajaran literasi pajak tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan secara tematik melalui Pendidikan Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Matematika, atau proyek penguatan karakter, dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran dan beban kognitif peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengkaji penerapan awal model literasi pajak berbasis pendidikan karakter bagi siswa kelas V SDN 176 Belajen, Enrekang. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk memetakan kebutuhan dan pemahaman awal peserta didik, merumuskan tujuan, materi, tahapan pembelajaran, media, serta asesmen model, dan menelaah keterlaksanaan serta perubahan awal pada pemahaman literasi pajak dan karakter kewargaan siswa. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memprediksi kepatuhan pajak siswa pada masa dewasa, tetapi untuk menghasilkan dasar pedagogis yang sistematis bagi pembentukan warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, kritis, dan bertanggung jawab sejak jenjang sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang bertujuan mengembangkan model literasi pajak berbasis pendidikan karakter untuk membentuk *Smart Citizen sejak Dini* pada siswa sekolah dasar. Pendekatan pengembangan dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan kondisi pembelajaran, tetapi juga menghasilkan produk pendidikan berupa model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan mengadaptasi prosedur Borg dan Gall yang disederhanakan menjadi lima tahapan utama, yaitu: (1) analisis kebutuhan (*research and information collecting*), (2) perencanaan model (*planning*), (3) pengembangan produk awal (*develop preliminary product*), (4) validasi dan revisi produk (*validation and revision*), serta (5) uji coba terbatas (*limited try out*). Penyederhanaan tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik penelitian pendidikan dasar yang berfokus pada pengembangan model pembelajaran dalam konteks sekolah tertentu.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SDN 176 Belajen, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V sekolah dasar yang terlibat dalam tahap analisis kebutuhan dan uji coba terbatas model pembelajaran. Pemilihan siswa kelas V dilakukan secara purposif karena pada tahap perkembangan ini peserta didik telah memiliki kemampuan membaca pemahaman, berpikir logis sederhana, melakukan diskusi, serta menghubungkan konsep pembelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Selain peserta didik, penelitian juga melibatkan guru kelas V sebagai sumber informasi mengenai karakteristik peserta didik, kondisi pembelajaran, kebutuhan pengembangan model, serta keterlaksanaan implementasi pembelajaran. Validator ahli yang terdiri atas ahli pendidikan dasar, ahli pendidikan karakter, dan ahli literasi ekonomi/pajak dilibatkan pada tahap validasi produk.

Tahapan Pengembangan Model

Pengembangan model dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, yang bertujuan mengidentifikasi kondisi awal pemahaman siswa mengenai pajak, fungsi fasilitas publik, tanggung jawab warga negara, serta nilai karakter yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi pembelajaran, wawancara guru, dan angket awal kepada peserta didik. Tahap kedua adalah perancangan model pembelajaran. Model literasi pajak berbasis pendidikan karakter

dirancang dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu (1) literasi konseptual mengenai pengertian dan fungsi pajak, (2) penguatan nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keadilan, serta (3) pengembangan keterampilan kewargaan melalui aktivitas diskusi, pengambilan keputusan, dan refleksi sosial.

Tahap ketiga adalah pengembangan produk awal, berupa penyusunan sintaks model pembelajaran, modul ajar, lembar aktivitas peserta didik, media pembelajaran kontekstual, serta instrumen asesmen literasi pajak dan karakter. Produk awal kemudian dilakukan validasi oleh para ahli untuk memperoleh masukan mengenai kelayakan isi, konstruksi model, kesesuaian materi dengan perkembangan siswa sekolah dasar, dan keterlaksanaan pembelajaran. Tahap keempat adalah revisi produk berdasarkan hasil validasi ahli. Produk yang telah diperbaiki selanjutnya diuji coba secara terbatas pada siswa kelas V SDN 176 Belajen untuk memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan model, respons siswa, serta perubahan awal kemampuan literasi pajak dan karakter kewargaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan tes pemahaman. Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik selama penerapan model. Wawancara dilakukan terhadap guru kelas untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembelajaran, kendala implementasi, dan respons terhadap model yang dikembangkan. Angket digunakan untuk mengukur respons peserta didik terhadap pembelajaran serta persepsi awal dan akhir mengenai literasi pajak dan nilai karakter. Instrumen tes digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman siswa mengenai konsep dasar pajak, fungsi pajak dalam kehidupan masyarakat, serta hubungan antara kontribusi warga dan pelayanan publik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa perangkat pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil pekerjaan peserta didik.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri atas lembar validasi ahli, pedoman wawancara, lembar observasi, angket respons peserta didik, dan instrumen pengukuran literasi pajak berbasis karakter. Instrumen literasi pajak dikembangkan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu aspek kognitif (pemahaman konsep pajak dan fungsi publik), aspek afektif (nilai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan keadilan), serta aspek keterampilan kewargaan (kemampuan berdiskusi, memberikan alasan, dan mengambil keputusan sederhana). Validitas instrumen dilakukan melalui *expert judgment* oleh ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan karakter, dan literasi ekonomi. Perbaikan instrumen dilakukan berdasarkan rekomendasi validator sebelum digunakan dalam tahap uji coba.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil validasi ahli, angket respons siswa, dan skor tes dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa nilai rata-rata dan persentase ketercapaian. Peningkatan pemahaman siswa sebelum dan sesudah penerapan model dianalisis berdasarkan perbandingan skor pretest dan posttest. Data kualitatif yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis

menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi kelayakan, keterlaksanaan, dan potensi efektivitas model literasi pajak berbasis pendidikan karakter.

Keabsahan Data dan Etika Penelitian

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data peserta didik, guru, observasi, dan instrumen penelitian, serta diperkuat melalui validasi ahli terhadap model yang dikembangkan. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian pendidikan melalui izin sekolah, perlindungan identitas peserta didik, dan pelaksanaan pembelajaran yang aman serta sesuai dengan perkembangan siswa. Penelitian ini berfokus pada pengembangan literasi kewargaan, karakter, dan pemahaman sosial mengenai kontribusi bersama, bukan pada pengukuran kepatuhan pajak peserta didik.

HASIL PENGEMBANGAN

Analisis Kebutuhan Pengembangan Model Literasi Pajak Berbasis Pendidikan Karakter

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal peserta didik, kebutuhan guru, serta aspek pembelajaran yang diperlukan dalam membangun pemahaman literasi pajak yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Analisis kebutuhan dilaksanakan pada siswa kelas V SDN 176 Belajen, Kabupaten Enrekang. Pemilihan kelas V didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta didik pada fase ini telah memiliki kemampuan berpikir logis, mampu memahami hubungan sebab-akibat sederhana, serta mulai mampu menghubungkan konsep pembelajaran dengan fenomena sosial di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa pemahaman siswa mengenai konsep pajak masih berada pada tahap pengenalan istilah. Sebagian besar siswa pernah mendengar istilah pajak melalui lingkungan keluarga, media, maupun pembelajaran umum, tetapi belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai makna pajak sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung penyediaan fasilitas dan layanan publik. Siswa cenderung memahami pajak sebagai sesuatu yang berkaitan dengan orang dewasa, seperti orang tua atau pelaku usaha, sehingga belum melihat keterkaitan antara pajak dengan kehidupan mereka sebagai pengguna fasilitas umum.

Pada aspek pemahaman fungsi pajak, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hubungan antara pajak dan berbagai fasilitas publik yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian siswa belum memahami bahwa keberadaan fasilitas seperti sekolah, jalan, layanan kesehatan, dan berbagai sarana masyarakat lainnya membutuhkan pengelolaan sumber daya bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep pajak masih bersifat abstrak bagi siswa sekolah dasar sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual melalui contoh nyata yang dekat dengan pengalaman peserta didik.

Hasil wawancara dengan guru kelas V menunjukkan bahwa materi mengenai pajak belum menjadi bagian pembelajaran yang secara khusus dikembangkan dalam kegiatan kelas. Guru menyampaikan bahwa konsep pajak memiliki tingkat kompleksitas tertentu apabila disampaikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar, terutama karena berkaitan dengan

sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu menyederhanakan konsep pajak tanpa menghilangkan makna utamanya, yaitu hubungan antara kontribusi warga, kepentingan bersama, dan keberlanjutan pelayanan publik.

Selain aspek pengetahuan, analisis kebutuhan juga memperhatikan aspek pendidikan karakter sebagai dasar pembentukan kesadaran kewargaan siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa telah memiliki beberapa karakter positif dalam lingkungan sekolah, seperti bekerja sama dalam kelompok, melaksanakan tugas kelas, mengikuti aturan sekolah, dan membantu teman. Namun, nilai-nilai tersebut masih lebih banyak dipahami dalam konteks hubungan sosial sehari-hari dan belum secara eksplisit dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Misalnya, konsep tanggung jawab belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum dan kepentingan bersama.

Hasil analisis kebutuhan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengembangan literasi pajak pada siswa sekolah dasar tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai definisi pajak, tetapi perlu dikembangkan melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, nilai karakter, dan keterampilan kewargaan. Ringkasan hasil analisis kebutuhan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Kebutuhan Literasi Pajak Siswa Kelas V SDN 176 Belajen

Aspek Analisis	Indikator	Temuan Analisis Kebutuhan	Implikasi Pengembangan Model
Pemahaman konsep dasar pajak	Kemampuan siswa menjelaskan pengertian pajak	Siswa telah mengenal istilah pajak, tetapi sebagian besar belum memahami makna pajak sebagai kontribusi warga untuk kepentingan bersama	Model perlu menyajikan konsep pajak menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar
Pemahaman fungsi pajak	Kemampuan menghubungkan pajak dengan fasilitas publik	Siswa belum memahami hubungan antara pajak dan penyediaan fasilitas seperti sekolah, jalan, kesehatan, dan sarana umum lainnya	Pembelajaran perlu menggunakan pendekatan kontekstual dengan memanfaatkan contoh fasilitas publik di lingkungan sekitar siswa
Kesadaran kewargaan	Pemahaman hubungan hak dan kewajiban warga negara	Siswa memahami aturan dan kewajiban di lingkungan sekolah, tetapi belum menghubungkan konsep tersebut dengan tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat	Model perlu mengembangkan pengalaman belajar yang menghubungkan perilaku sehari-hari dengan nilai kewargaan
Literasi sosial ekonomi	Pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya bersama	Siswa masih kesulitan memahami bahwa fasilitas publik membutuhkan kontribusi dan pengelolaan bersama	Diperlukan aktivitas simulasi dan pembelajaran berbasis pengalaman mengenai penggunaan sumber daya publik
Nilai tanggung jawab	Kemampuan menunjukkan sikap bertanggung jawab	Siswa telah menunjukkan tanggung jawab dalam aktivitas sekolah, tetapi belum memahami kaitannya dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas	Model perlu memperluas pemahaman tanggung jawab dari konteks pribadi menuju kepentingan masyarakat
Nilai kejujuran	Pemahaman pentingnya integritas dalam kehidupan sosial	Siswa memahami kejujuran dalam hubungan antarindividu, tetapi belum mengaitkannya dengan integritas sebagai warga negara	Pembelajaran perlu memasukkan diskusi kasus sederhana mengenai kejujuran dan dampaknya terhadap masyarakat

Nilai kepedulian sosial	Sikap peduli terhadap lingkungan dan fasilitas bersama	Siswa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, tetapi belum memahami konsep kepedulian terhadap fasilitas publik secara luas	Model perlu menyediakan aktivitas yang mendorong siswa memahami hubungan tindakan individu dengan kesejahteraan bersama
Strategi pembelajaran guru	Ketersediaan model pembelajaran literasi pajak	Guru belum memiliki model khusus untuk mengenalkan literasi pajak karena konsep dianggap abstrak bagi siswa SD	Dibutuhkan model pembelajaran yang mengintegrasikan literasi pajak, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan
Media pembelajaran	Ketersediaan bahan ajar kontekstual	Belum tersedia media yang menyajikan konsep pajak melalui pengalaman nyata siswa	Pengembangan model perlu dilengkapi modul, aktivitas siswa, media visual, dan simulasi pembelajaran

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama dalam pembelajaran literasi pajak di SDN 176 Belajen bukan hanya peningkatan pengetahuan mengenai pajak, tetapi pengembangan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara kontribusi warga, fasilitas publik, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, model Smart Citizen sejak Dini dikembangkan dengan pendekatan kontekstual berbasis pendidikan karakter yang menempatkan literasi pajak sebagai bagian dari pembentukan kesadaran kewargaan sejak jenjang sekolah dasar. Model ini diharapkan mampu membantu siswa memahami bahwa menjadi warga negara yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan memahami, menghargai, dan berkontribusi terhadap kepentingan bersama.

Pengembangan Model *Smart Citizen sejak Dini* Berbasis Literasi Pajak dan Pendidikan Karakter

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, penelitian ini mengembangkan model Smart Citizen sejak Dini berbasis literasi pajak dan pendidikan karakter sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran kewargaan peserta didik sekolah dasar. Model ini dikembangkan dengan pemahaman bahwa literasi pajak pada jenjang sekolah dasar tidak diarahkan untuk memberikan pengetahuan teknis perpajakan sebagaimana wajib pajak dewasa, tetapi sebagai proses awal membangun pemahaman mengenai kontribusi sosial, tanggung jawab warga negara, kepentingan publik, dan nilai karakter yang mendukung kehidupan bersama.

Model Smart Citizen sejak Dini mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu (1) literasi pajak dasar, berupa pemahaman mengenai konsep sederhana pajak, fungsi pajak, dan keterkaitan pajak dengan fasilitas publik; (2) pendidikan karakter, berupa penguatan nilai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan keadilan; serta (3) keterampilan kewargaan, berupa kemampuan mengamati fenomena sosial, berdiskusi, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan positif sebagai bagian dari masyarakat.

Untuk memberikan identitas model yang mudah dipahami dan diterapkan oleh guru sekolah dasar, model ini dikembangkan menggunakan sintaks CERDAS (*Civic Education through Responsible Awareness and Social Literacy*). Istilah CERDAS dipilih karena memiliki makna filosofis yang sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki kesadaran, karakter, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sintaks CERDAS terdiri atas enam tahapan utama, yaitu Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, dan Sadari.



Gambar 1. Model *Smart Citizen sejak Dini* Berbasis Literasi Pajak dan Pendidikan Karakter

Model CERDAS dikembangkan berdasarkan prinsip pembelajaran konstruktivistik, yaitu peserta didik membangun pemahaman melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi terhadap fenomena yang mereka temui. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam model dirancang menggunakan aktivitas yang dekat dengan kehidupan siswa sehingga konsep pajak yang bersifat abstrak dapat dipahami melalui pengalaman konkret.

1. Cermati Lingkungan Publik (*Civic Awareness*)

Tahap pertama bertujuan membangun kesadaran awal peserta didik mengenai keberadaan fasilitas publik yang mereka gunakan sehari-hari. Pembelajaran diawali dengan aktivitas pemantik (*ice catching*) melalui permainan "Detektif Fasilitas Publik". Dalam hal ini, Guru menampilkan gambar, video singkat, atau mengajak siswa melakukan pengamatan terhadap berbagai fasilitas yang ada di sekitar mereka, seperti: sekolah; jalan raya; fasilitas kesehatan; taman; sarana kebersihan; dan fasilitas pelayanan masyarakat. Guru kemudian memberikan pertanyaan pemantik:

"Siapa yang membangun tempat ini?"

"Apakah fasilitas ini dapat tersedia tanpa adanya kerja sama masyarakat?"

"Apa yang terjadi jika tidak ada yang menjaga fasilitas bersama?"

Melalui kegiatan tersebut, siswa mulai memahami bahwa kehidupan masyarakat membutuhkan fasilitas yang tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan kontribusi bersama.

2. Eksplorasi Makna Kontribusi (*Explore Shared Contribution*)

Tahap kedua bertujuan mengenalkan konsep kontribusi sosial sebelum siswa memahami konsep pajak secara lebih spesifik. Guru menggunakan aktivitas “Membangun Kota Impian”. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan sebuah situasi:

“Kelas kalian ingin memiliki taman yang indah, tempat membaca yang nyaman, dan lingkungan yang bersih. Apa yang harus dilakukan agar semua keinginan tersebut dapat terwujud?”

Siswa mendiskusikan bahwa suatu tujuan bersama membutuhkan: kerja sama; pembagian tugas; kepedulian; dan kontribusi setiap anggota. Guru kemudian menghubungkan konsep tersebut dengan kehidupan masyarakat bahwa pembangunan fasilitas publik juga membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, salah satunya melalui pajak.

3. Refleksi Hubungan Pajak dan Kehidupan (*Reflect Tax Function*)

Tahap ketiga berfokus pada pengembangan literasi pajak dasar. Guru memperkenalkan konsep pajak melalui aktivitas “Jejak Pajak di Sekitarku”. Siswa diberikan kartu atau gambar yang berisi berbagai fasilitas publik, kemudian diminta menghubungkan fasilitas tersebut dengan manfaatnya. Contoh:

Fasilitas Publik	Manfaat
Sekolah	Tempat belajar dan memperoleh pendidikan
Rumah sakit	Mendukung pelayanan kesehatan
Jalan	Mempermudah aktivitas masyarakat
Taman	Ruang interaksi masyarakat
Kebersihan kota	Menciptakan lingkungan sehat

Guru menjelaskan secara sederhana bahwa berbagai fasilitas tersebut membutuhkan sumber daya untuk pembangunan dan pemeliharaan, salah satunya berasal dari kontribusi masyarakat melalui sistem pajak.

4. Diskusi Nilai Kewargaan (*Discuss Civic Values*)

Tahap keempat mengintegrasikan literasi pajak dengan pendidikan karakter melalui diskusi dilema moral sederhana. Guru memberikan kasus:

“Dalam sebuah lingkungan, semua warga ingin menggunakan jalan yang bagus dan fasilitas umum yang nyaman. Namun, sebagian warga tidak ingin berkontribusi karena merasa tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut. Menurut kalian, apakah tindakan tersebut adil?”

Siswa berdiskusi mengenai: kejujuran; tanggung jawab; keadilan; dan kepedulian. Dalam hal ini, siswa dilatih untuk memberikan alasan, mendengarkan pendapat orang lain, dan memahami bahwa kehidupan bersama membutuhkan sikap bertanggung jawab.

5. Aksi sebagai *Smart Citizen* (*Act as Smart Citizen*)

Tahap kelima merupakan implementasi nilai melalui kegiatan nyata. Aktivitas utama pada tahap ini adalah simulasi “Desa Mini Smart Citizen”. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan peran: warga masyarakat; pemerintah desa; pengelola fasilitas publik; dan kelompok pengawas.

Setiap kelompok memperoleh sejumlah simbol sumber daya (*smart coin*) yang harus digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan fasilitas bersama. Siswa berdiskusi mengenai: fasilitas apa yang harus diprioritaskan; alasan memilih fasilitas tersebut; bagaimana menjaga agar fasilitas dapat digunakan bersama.

6. Sadari Peran sebagai Warga Masa Depan (*Self Reflection*)

Tahap terakhir bertujuan memperkuat kesadaran diri peserta didik sebagai calon warga negara. Siswa melakukan refleksi melalui pertanyaan:

“Apa yang dapat saya lakukan mulai sekarang agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab?”

Refleksi dapat dilakukan melalui tulisan singkat, gambar, atau presentasi sederhana. Hasil refleksi diarahkan untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa mengenai: pentingnya kontribusi bersama; hubungan hak dan kewajiban warga negara; pentingnya menjaga fasilitas publik; dan peran karakter dalam kehidupan masyarakat.

Model Smart Citizen sejak Dini melalui sintaks CERDAS memberikan pendekatan inovatif dalam pembelajaran sekolah dasar karena mengintegrasikan literasi pajak dengan pendidikan karakter melalui pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Model ini tidak menempatkan pajak sebagai materi ekonomi yang bersifat abstrak, tetapi sebagai sarana pendidikan kewargaan untuk membangun generasi muda yang memiliki kesadaran publik, integritas, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama sejak usia dini.

Validasi Kelayakan Model Smart Citizen sejak Dini

Tahap validasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan model Smart Citizen sejak Dini berbasis literasi pajak dan pendidikan karakter sebelum diterapkan dalam uji coba terbatas pada siswa kelas V SDN 176 Belajen. Validasi dilakukan melalui penilaian ahli (*expert judgment*) yang melibatkan tiga validator dengan kompetensi berbeda, yaitu ahli pendidikan dasar, ahli pendidikan karakter, dan ahli literasi pajak. Proses validasi bertujuan memastikan bahwa model yang dikembangkan memiliki kesesuaian secara konseptual, pedagogis, dan substansial dengan karakteristik pembelajaran sekolah dasar.

Penilaian dilakukan menggunakan instrumen berbentuk skala Likert dengan rentang skor 1–5 yang mencakup beberapa aspek, yaitu struktur dan sintaks model, kesesuaian materi dengan perkembangan siswa sekolah dasar, integrasi nilai karakter, ketepatan konsep literasi pajak, penggunaan bahasa, serta keterlaksanaan pembelajaran. Hasil validasi ahli terhadap model disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Validasi Ahli terhadap Model *Smart Citizen sejak Dini*

Validator	Aspek yang Dinilai	Skor Rata-rata	Kategori
Ahli Pendidikan Dasar	Struktur model, sintaks pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik siswa SD, dan keterlaksanaan pembelajaran	4,50	Sangat Layak
Ahli Pendidikan Karakter	Integrasi nilai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, keadilan, dan kesadaran sosial	4,60	Sangat Layak
Ahli Literasi	Ketepatan konsep dasar pajak, hubungan pajak dengan layanan publik, dan kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan siswa	4,40	Sangat Layak
Rata-rata keseluruhan	Kelayakan model secara umum	4,50	Sangat Layak

Berdasarkan hasil validasi pada Tabel 2, model *Smart Citizen sejak Dini* memperoleh nilai rata-rata 4,50 dengan kategori sangat layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang dikembangkan telah memenuhi aspek kelayakan sebagai model pembelajaran sekolah dasar. Ahli pendidikan dasar memberikan penilaian positif terhadap struktur model CERDAS yang terdiri atas tahapan Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, dan Sadari. Sintaks tersebut dinilai sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, membangun pemahaman, berdiskusi, melakukan simulasi, dan merefleksikan pengalaman belajar.

Dari aspek perkembangan peserta didik, model dinilai sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar karena menggunakan pendekatan konkret dan kontekstual. Konsep pajak yang pada awalnya bersifat abstrak disederhanakan melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti mengenali fasilitas publik, memahami manfaat bersama, dan melakukan simulasi pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut memungkinkan siswa membangun pemahaman secara bertahap melalui pengalaman nyata.

Pada aspek pendidikan karakter, validator menilai bahwa model telah berhasil mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran literasi pajak. Nilai tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan keadilan tidak hanya disampaikan sebagai konsep, tetapi dikembangkan melalui aktivitas diskusi moral, simulasi kewargaan, dan refleksi. Hal ini menjadikan model tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kesadaran sosial peserta didik.

Selain itu, ahli literasi pajak menilai bahwa konsep pajak dalam model telah disajikan secara proporsional untuk tingkat sekolah dasar. Model tidak menempatkan pajak sebagai materi administratif, melainkan sebagai sarana memahami hubungan antara kontribusi masyarakat, pelayanan publik, dan tanggung jawab warga negara. Dengan demikian, hasil validasi menunjukkan bahwa model *Smart Citizen sejak Dini* memiliki kelayakan teoritis dan pedagogis untuk diterapkan sebagai alternatif pembelajaran literasi kewargaan berbasis karakter di sekolah dasar.

Implementasi Model dan Respons Peserta Didik

Uji coba terbatas model Smart Citizen sejak Dini dilakukan pada siswa kelas V SDN 176 Belajen untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran, respons peserta didik, serta perubahan awal pemahaman literasi pajak dan karakter kewargaan setelah penerapan model. Uji coba dilakukan melalui penerapan sintaks CERDAS (Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, dan Sadari) dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan konsep pajak dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Selama proses implementasi, pembelajaran dilaksanakan melalui aktivitas pengamatan fasilitas publik, diskusi kelompok, permainan peran *Desa Mini Smart Citizen*, serta kegiatan refleksi nilai karakter. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan hubungan antara kontribusi masyarakat, keberadaan fasilitas umum, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Keterlaksanaan Pembelajaran Model *Smart Citizen sejak Dini*

Aktivitas Pembelajaran	Persentase Keterlaksanaan	Kategori
Cermati lingkungan publik melalui observasi dan identifikasi fasilitas bersama	92%	Sangat Baik
Diskusi kelompok mengenai fungsi pajak dan nilai kewargaan	90%	Sangat Baik
Simulasi kewargaan <i>Desa Mini Smart Citizen</i>	95%	Sangat Baik
Refleksi karakter dan tanggung jawab sosial	88%	Sangat Baik
Rata-rata keseluruhan	91,25%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3, keterlaksanaan model memperoleh rata-rata 91,25% dengan kategori sangat baik. Aktivitas simulasi kewargaan memperoleh persentase tertinggi sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bermain peran dan pengambilan keputusan bersama menjadi aktivitas yang paling menarik bagi peserta didik. Melalui simulasi tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi mengalami langsung proses mempertimbangkan kepentingan bersama, menentukan prioritas, dan memahami pentingnya tanggung jawab sosial.

Aktivitas diskusi kelompok juga menunjukkan keterlibatan siswa yang tinggi dengan persentase 90%. Siswa mulai mampu menyampaikan pendapat mengenai hubungan pajak dengan fasilitas publik serta memberikan alasan sederhana mengenai pentingnya kontribusi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa model CERDAS mampu menciptakan ruang pembelajaran yang interaktif dan mendorong kemampuan berpikir kritis sederhana sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar.

Selain keterlaksanaan pembelajaran, respons peserta didik terhadap model yang dikembangkan juga dianalisis melalui angket setelah pembelajaran. Hasil respons menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan model. Siswa menyatakan bahwa pembelajaran lebih menarik dibandingkan pembelajaran yang hanya menjelaskan konsep melalui teks, karena mereka dapat mengamati contoh nyata, berdiskusi, bermain peran, dan membuat keputusan dalam situasi simulasi. Indikator respons peserta didik meliputi:

Indikator Respons Siswa	Hasil Respons
Pembelajaran literasi pajak melalui model CERDAS menarik dan menyenangkan	Sangat Positif
Materi pajak mudah dipahami melalui contoh kehidupan sehari-hari	Sangat Positif
Model membantu memahami hubungan pajak dengan fasilitas publik	Positif
Kegiatan pembelajaran meningkatkan kepedulian terhadap fasilitas bersama	Sangat Positif
Diskusi dan simulasi membantu memahami tanggung jawab sebagai warga negara	Sangat Positif

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dalam model *Smart Citizen sejak Dini* mampu mengurangi kesulitan siswa dalam memahami konsep pajak yang sebelumnya dianggap abstrak. Melalui penggunaan contoh nyata dan aktivitas pengalaman langsung, siswa dapat memahami bahwa pajak memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari serta kepentingan masyarakat secara luas. Perubahan pemahaman siswa juga dianalisis melalui perbandingan hasil pretest dan posttest. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman literasi pajak setelah penerapan model.

Tabel 4. Perubahan Pemahaman Literasi Pajak Siswa

Tahap Pengukuran	Rata-rata Skor	Kategori
Pretest sebelum penerapan model	65%	Cukup
Posttest setelah penerapan model	84%	Baik
Peningkatan	19%	Meningkat

Peningkatan skor sebesar 19% menunjukkan bahwa penerapan model *Smart Citizen sejak Dini* memberikan dampak positif terhadap pemahaman awal siswa mengenai literasi pajak. Peningkatan tersebut terjadi karena pembelajaran tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi melibatkan siswa dalam proses mengamati, mengalami, mendiskusikan, dan merefleksikan konsep yang dipelajari.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis konteks dapat menjadi pendekatan efektif untuk mengenalkan konsep sosial yang abstrak kepada siswa sekolah dasar. Melalui model CERDAS, literasi pajak tidak dipahami sebagai materi ekonomi yang terpisah dari kehidupan siswa, tetapi sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan kesadaran kewargaan. Dengan demikian, implementasi model *Smart Citizen sejak Dini* memberikan kontribusi dalam membangun fondasi karakter warga negara yang memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap kepentingan bersama sejak usia sekolah dasar.

PEMBAHASAN INTEGRATIF

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *Smart Citizen sejak Dini* melalui sintaks CERDAS (Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, dan Sadari) mampu menjadi alternatif pendekatan pembelajaran untuk mengenalkan literasi pajak pada siswa sekolah dasar secara kontekstual. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengenalan pajak pada jenjang sekolah dasar tidak harus ditempatkan sebagai pembelajaran ekonomi yang bersifat teknis, tetapi dapat dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan kewargaan (*civic education*) yang menanamkan pemahaman mengenai kontribusi sosial, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Literasi pajak penting dikenalkan sejak sekolah dasar karena pemahaman mengenai hubungan antara individu, masyarakat, dan negara tidak terbentuk secara spontan, tetapi berkembang melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Pajak merupakan salah satu bentuk hubungan sosial antara warga negara dan pemerintah, sehingga pemahaman awal mengenai pajak berkaitan dengan pembentukan kesadaran sebagai warga negara. Penelitian mengenai *tax morale* menunjukkan bahwa perilaku perpajakan pada masa dewasa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau ancaman sanksi, tetapi juga oleh nilai sosial, kepercayaan terhadap institusi, persepsi keadilan, serta pemahaman mengenai manfaat kontribusi publik (Frey & Torgler, 2007; Luttmer & Singhal, 2014). Oleh karena itu, pengenalan literasi pajak sejak dini dapat dipandang sebagai investasi pendidikan untuk membangun fondasi kesadaran kewargaan sebelum individu memasuki tahap sebagai wajib pajak.

Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa literasi pajak pada anak perlu dipahami secara luas. Bornman dan Ramutumbu (2019) menjelaskan bahwa literasi pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan perpajakan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi pajak dan maknanya dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, Bornman dan Wassermann (2023) menegaskan bahwa literasi pajak merupakan kombinasi antara pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan kemampuan menggunakan informasi perpajakan secara tepat. Dalam konteks sekolah dasar, konsep tersebut diterjemahkan melalui pemahaman sederhana mengenai fungsi pajak, manfaat fasilitas publik, dan tanggung jawab masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa model *Smart Citizen sejak Dini* tidak bertujuan menciptakan “wajib pajak kecil”, tetapi membangun dasar pemikiran mengenai kewargaan fiskal (*fiscal citizenship*).

Hubungan antara literasi pajak dan pendidikan karakter menjadi kontribusi utama model yang dikembangkan. Pajak pada dasarnya mengandung dimensi moral karena berkaitan dengan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Seseorang yang memahami pajak bukan hanya memahami mekanisme kontribusi, tetapi juga memahami alasan mengapa masyarakat perlu berkontribusi terhadap kepentingan bersama. Perspektif ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang menempatkan nilai bukan hanya sebagai pengetahuan moral (*moral knowing*), tetapi juga sebagai perasaan moral (*moral feeling*) dan tindakan moral (*moral action*) (Lickona, 1991). Melalui model CERDAS, siswa tidak hanya diberi informasi tentang pajak, tetapi dilibatkan dalam diskusi dilema, simulasi pengambilan keputusan, dan aktivitas reflektif sehingga nilai karakter dikembangkan melalui pengalaman nyata.

Integrasi literasi pajak dengan pendidikan karakter juga memperluas makna pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada pengenalan simbol negara, aturan, atau hak dan kewajiban formal, tetapi juga membangun kemampuan peserta didik untuk memahami persoalan sosial dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Althof dan Berkowitz (2006) menjelaskan bahwa pendidikan moral, pendidikan karakter, dan pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan karena semuanya bertujuan membentuk individu yang mampu berpartisipasi secara etis dalam kehidupan demokratis. Dalam penelitian ini, konsep pajak menjadi konteks nyata untuk mengembangkan nilai tersebut karena siswa belajar bahwa keputusan individu dapat memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Model *Smart Citizen sejak Dini* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan pendidikan pajak konvensional. Pendidikan pajak konvensional umumnya berorientasi pada peningkatan pengetahuan mengenai aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, terutama bagi kelompok usia produktif atau calon wajib pajak. Pendekatan tersebut penting, tetapi kurang sesuai apabila langsung diterapkan pada siswa sekolah dasar karena konsep pajak memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Model *Smart Citizen* mengubah pendekatan tersebut menjadi pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan menghubungkan pajak pada situasi yang dekat dengan kehidupan anak, seperti sekolah, jalan, kebersihan lingkungan, dan fasilitas umum.

Perbedaan lainnya terletak pada orientasi hasil pembelajaran. Pendidikan pajak konvensional lebih sering mengukur keberhasilan melalui peningkatan pengetahuan faktual, sedangkan model *Smart Citizen* mengembangkan tiga capaian secara bersamaan, yaitu pengetahuan (*knowledge*), karakter (*character*), dan tindakan kewargaan (*civic action*). Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian pendidikan karakter yang menunjukkan bahwa pembelajaran nilai lebih efektif ketika peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengalami, berdiskusi, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan nyata (Berkowitz & Bier, 2004; Durlak et al., 2011). Dengan demikian, model ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan literasi pajak sebagai media pembentukan karakter kewargaan, bukan hanya sebagai materi ekonomi.

Dari perspektif praktik pendidikan dasar, model *Smart Citizen* memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, bagi guru sekolah dasar, model ini menyediakan alternatif strategi pembelajaran untuk mengajarkan konsep sosial yang abstrak melalui pendekatan kontekstual, permainan peran, diskusi moral, dan refleksi. Guru tidak perlu mengajarkan aspek teknis perpajakan, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami hubungan antara kontribusi, pelayanan publik, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik pembelajaran sekolah dasar yang menekankan pengalaman konkret dan keterlibatan aktif peserta didik.

Kedua, bagi pengembangan kurikulum sekolah dasar, model ini menunjukkan bahwa literasi pajak dapat diintegrasikan secara lintas mata pelajaran, terutama dalam Pendidikan Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Matematika kontekstual, dan proyek penguatan karakter. Integrasi tersebut sejalan dengan arah pendidikan saat ini yang menekankan pembentukan kompetensi peserta didik secara utuh, tidak hanya aspek akademik tetapi juga karakter dan kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Model ini dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan pembelajaran berbasis Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bernalar kritis, gotong royong, dan bertanggung jawab.

Ketiga, bagi pendidikan calon guru sekolah dasar, model ini memberikan implikasi terhadap penguatan kompetensi pedagogik mahasiswa PGSD. Calon guru perlu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan konsep sosial, ekonomi, dan kewargaan yang kompleks menjadi pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Penguasaan model seperti *Smart Citizen* dapat membantu calon guru memahami bahwa pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran sosial sejak awal, termasuk kesadaran mengenai hubungan warga negara dengan sistem publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan pengembangan model Smart Citizen sejak Dini berbasis literasi pajak dan pendidikan karakter sebagai alternatif pendekatan pembelajaran kewargaan pada jenjang sekolah dasar. Model ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa kelas V SDN 176 Belajen yang menunjukkan bahwa pemahaman awal mengenai pajak masih terbatas pada pengenalan istilah dan belum sepenuhnya memahami hubungan antara pajak, fasilitas publik, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, model yang dikembangkan tidak menempatkan pajak sebagai konsep ekonomi yang bersifat administratif, tetapi sebagai sarana pendidikan karakter untuk membangun kesadaran sosial dan kewargaan sejak usia dini.

Model Smart Citizen sejak Dini dikembangkan melalui sintaks CERDAS (Cermati, Eksplorasi, Refleksi, Diskusi, Aksi, dan Sadari) yang mengintegrasikan literasi pajak, nilai karakter, dan keterampilan kewargaan. Tahapan model dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan pengalaman nyata siswa, seperti mengenali fasilitas publik, memahami makna kontribusi bersama, mendiskusikan nilai kejujuran dan tanggung jawab, melakukan simulasi kewargaan, serta merefleksikan peran sebagai warga negara masa depan. Pendekatan tersebut memungkinkan siswa memahami konsep pajak yang abstrak melalui pengalaman belajar yang konkret, aktif, dan bermakna.

Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa model yang dikembangkan berada pada kategori sangat layak dengan rata-rata skor 4,50. Validasi tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian secara pedagogis, substansi materi, dan integrasi nilai karakter dengan karakteristik pembelajaran sekolah dasar. Uji coba terbatas juga menunjukkan bahwa model dapat diterapkan dengan baik, ditunjukkan melalui keterlaksanaan pembelajaran sebesar 91,25%, respons positif peserta didik terhadap aktivitas pembelajaran, serta peningkatan pemahaman literasi pajak dari 65% pada tahap awal menjadi 84% setelah penerapan model.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model Smart Citizen sejak Dini yang menempatkan literasi pajak sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter. Model ini menunjukkan bahwa konsep pajak dapat dikenalkan kepada siswa sekolah dasar melalui pendekatan kontekstual, pengalaman nyata, permainan peran, diskusi nilai, dan refleksi sosial untuk membangun karakter tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, serta kesadaran terhadap kepentingan bersama.

Model ini memberikan implikasi bagi guru sekolah dasar dalam mengembangkan pembelajaran sosial yang bermakna melalui integrasi literasi pajak dengan Pendidikan Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan penguatan karakter. Namun, penelitian ini masih terbatas pada uji coba di satu sekolah sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan desain pengujian efektivitas yang lebih kuat. Dengan pengembangan lebih lanjut, model Smart Citizen sejak Dini berpotensi menjadi inovasi pembelajaran dalam membentuk warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan peduli sejak jenjang sekolah dasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, guru, dan peserta didik kelas V SDN 176 Belajen atas dukungan dan kerja sama selama penelitian berlangsung.

PENDANAAN

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri tanpa pendanaan khusus.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

AI digunakan secara terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa dan perbaikan struktur penulisan tanpa memengaruhi data dan substansi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alexander, P., & Balavac-Orlić, M. (2022). Tax morale: Framing and fairness. *Economic Systems*, 46(1), 100936. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100936>
- [2] Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495–518. <https://doi.org/10.1080/03057240601012204>
- [3] Amagir, A., Groot, W., Maassen van den Brink, H., & Wilschut, A. (2018). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. *Citizenship, Social and Economics Education*, 17(1), 56–80. <https://doi.org/10.1177/2047173417719555>
- [4] Batty, M., Collins, J. M., & Odders-White, E. (2015). Experimental evidence on the effects of financial education on elementary school students' knowledge, behavior, and attitudes. *Journal of Consumer Affairs*, 49(1), 69–96. <https://doi.org/10.1111/joca.12058>
- [5] Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research-based character education. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 72–85. <https://doi.org/10.1177/0002716203260082>
- [6] Björklund, M. (2025). Financial citizenship education and the elusive power of critical inquiry. *Theory & Research in Social Education*, 53(2), 272–295. <https://doi.org/10.1080/00933104.2024.2406789>
- [7] Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- [8] Bornman, M., & Wassermann, M. (2023). Tax literacy: What does it mean? *Meditari Accountancy Research*, 31(3), 501–518. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0847>
- [9] Bruhn, M., Leão, L. de S., Legovini, A., Marchetti, R., & Zia, B. (2016). The impact of high school financial education: Evidence from a large-scale evaluation in Brazil. *American Economic Journal: Applied Economics*, 8(4), 256–295. <https://doi.org/10.1257/app.20150149>
- [10] Celio, C. I., Durlak, J., & Dymnicki, A. (2011). A meta-analysis of the impact of service-learning on students. *Journal of Experiential Education*, 34(2), 164–181. <https://doi.org/10.1177/105382591103400205>
- [11] Collins, J. M., & Odders-White, E. (2015). A framework for developing and testing financial capability education programs targeted to elementary schools. *The Journal of Economic Education*, 46(1), 105–120. <https://doi.org/10.1080/00220485.2014.976325>
- [12] Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- [13] Fernandes, D., Lynch, J. G., Jr., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. *Management Science*, 60(8), 1861–1883. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849>
- [14] Frey, B. S., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136–159. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>
- [15] Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. *Annual Review of Economics*, 5, 347–373. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082312-125807>
- [16] Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). The role of tax literacy on economics undergraduated students' tax awareness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jia.v7i1.44067>

- [17] Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2017). Does financial education impact financial literacy and financial behavior, and if so, when? *The World Bank Economic Review*, 31(3), 611–630. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx018>
- [18] Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics*, 145(2), 255–272. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.022>
- [19] Kristjánsson, K. (2013). Ten myths about character, virtue and virtue education—Plus three well-founded misgivings. *British Journal of Educational Studies*, 61(3), 269–287. <https://doi.org/10.1080/00071005.2013.778386>
- [20] Lago-Peñas, I., & Lago-Peñas, S. (2010). The determinants of tax morale in comparative perspective: Evidence from European countries. *European Journal of Political Economy*, 26(4), 441–453. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.06.003>
- [21] Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- [22] Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 358–380. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x>
- [23] Luttmmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- [24] Mac, Y. T. H. (2025). Exploring the links between tax education, tax awareness and tax compliance among students in Vietnam. *Economy of Regions*, 21(4), 1207–1220. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2025-4-19>
- [25] Rodríguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- [26] Sanderse, W. (2013). The meaning of role modelling in moral and character education. *Journal of Moral Education*, 42(1), 28–42. <https://doi.org/10.1080/03057240.2012.690727>
- [27] Schultz, L. H., Barr, D. J., & Selman, R. L. (2001). The value of a developmental approach to evaluating character development programmes: An outcome study of Facing History and Ourselves. *Journal of Moral Education*, 30(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/03057240120033785>